

PENDIDIKAN PUSTAKAWAN, MAU KEMANA ?

Oleh: Lasa Hs.*

ABSTRAKS

Pendidikan pustakawan di Indonesia kini tengah berkembang dengan indikator antara lain dengan dibukanya program studi jurusan perpustakaan diploma, sarjana, dan pascasarjana di beberapa perguruan tinggi. Maraknya penyelenggaraan pendidikan ini di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi dari sisi lain sulit dicapai standarisasi penyelenggaraan dan kualitas lulusan karena lemahnya pengawasan mutu/*quality control*.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga perpustakaan, kini banyak diselenggarakan kursus-kursus singkat. Bersamaan itu juga telah diluluskan program diploma maupun sarjana dari pendidikan formal yakni perguruan tinggi. Dengan adanya dua macam pendidikan tersebut kemungkinan terjadi standar ganda. Sebagai contoh adalah program penyetaraan pustakawan yang diselenggarakan sekitar 4-5 bulan disamakan dengan lulusan diploma suatu perguruan tinggi yang masa studinya 2-3 tahun.

Pustakawan sebagai tenaga profesional seharusnya memilih pendidikan dengan standar minimal diploma bahkan sarjana (seperti profesi lain) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bukannya oleh sembarang lembaga. Sebab tugas-tugas profesional merupakan tugas dan pekerjaan intelektual. Dengan kemampuan ini diharapkan mampu mengembangkan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan.

Kata kunci: Pendidikan Profesi, Pustakawan.

Pendahuluan

Bulan Mei memiliki karakteristik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan kembali dan direalisasikan dalam kehidupan kita. Pada bulan itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama

apabila dilihat dari segi pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tanggal 2 Mei adalah hari Pendidikan, tanggal 20 Mei adalah hari Kebangkitan Nasional, dan tanggal 21 Mei adalah hari kelahiran Reformasi. Kemudian apabila 3 (tiga) bidang itu dicermati secara

obyektif, maka keadaannya cukup memprihatinkan. Kualitas pendidikan kita kurang menggembirakan, sumberdaya manusia kita juga sangat rendah walaupun di kawasan Asia Tenggara, dan kesadaran berbangsa bernegara juga rendah antara lain dengan meratanya korupsi dan menjamurnya politikus busuk.

Demikian pula dengan pendidikan pustakawan yang sebenarnya tidak luput dari berbagai problem. Di satu sisi memang terdapat kebutuhan tenaga Profesional yang dalam pemenuhannya kadang ditempuh jalan pintas. Penyelenggaraan pendidikan pustakawan (dan bidang lain) kadang tidak memperhatikan kualitas. Juga di beberapa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan itu kurang memperhatikan sarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, maupun kualitas pengajar.

Dari segi lain, apabila pembuk-aan program studi/jurusan tersebut tidak dibatasi kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun lagi terjadi kejenuhan profesi terutama lulusan diploma. Nantinya program diploma ini akan tutup dan dituntut adanya pendidikan sarjana sebagai standarisasi profesi pustakawan. Hal ini merupakan

sesuatu yang alami sebagaimana dialami oleh profesi lain seperti guru, dosen, dan lainnya.

Latar Belakang

Perlunya pembahasan tentang pendidikan pustakawan ini dilandasi beberapa pemikiran dan latar belakang antara lain:

1. Rendahnya kualitas dan kinerja pustakawan Meskipun kini telah banyak lulusan perpustakaan tingkat diploma, sarjana, bahkan pascasarjana, namun belum membawa perubahan yang signifikan. Indikator rendahnya kualitas dan kinerja ini antara lain kondisi perpustakaan pada umumnya belum menunjukkan perubahan yang berarti, minimnya karya tulis (terutama buku dan penelitian) tentang perpustakaan, posisi tawarnya rendah, terjebak oleh virus birokrasi, dan rendahnya minat baca masyarakat.
2. Perlunya standarisasi pendidikan pustakawan Untuk memperoleh standar mutu pendidikan pustakawan, perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan ini. Penilaian atau akreditasi ini meliputi; rekrutmen calon, kurikulum, sarana prasarana, sistem pembelajaran, daya scrap lulusan, produktivitas

Artikel

dosen, pembiayaan, dan lainnya. Tanpa adanya standar penyelenggaraan dikhawatirkan terjadi pemborosan dan penurunan kualitas yang akhirnya kalah bersaing.

3. Belum adanya evaluasi terhadap daya serap lulusan diploma atau sarjana bidang perpustakaan.

Sepengetahuan penulis, sampai kini belum ada penelitian maupun langkah-langkah penja-jagan sejauh mana lulusan pustakawan (diploma, sarjana, pascasarjana) itu terserap oleh pasar. Hasil kegiatan ini berguna untuk menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan pustakawan dengan memperhatikan kualitas lulusan yang diharapkan pasar. Sebab tanpa adanya data ini akan semakin banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan perpustakaan, padahal dalam realita tenaga yang dihasilkan tidak mampu terserap. Ketidakmampuan daya serap ini mungkin faktor keuangan, perhatian, koleksi, sistem, dan sarana prasarana perpustakaan lembaga.

4. Lulusan pendidikan pustakawan kurang mampu mengembangkan diri. Lulusan pendidikan ini kurang berani melangkah untuk-

mengembangkan diri, baik dalam pembinaan perpustakaan lain (perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, dll.) maupun pengembangan diri melalui tulisan, penelitian, merubah pola pikir dan pola kerja lama, penciptaan lapangan kerja baru, diskusi ilmiah, dan lainnya. Mereka cenderung bekerja di suatu perpustakaan tanpa memperhatikan pengembangan perpustakaan lain atau masyarakat pada umumnya.

Hal ini mungkin disebabkan kurangnya jiwa profesionalisme, tidak dimilikinya pengetahuan kewirausahaan/enterpreneurship, merasa rendah diri, kurang wawasan, takut melangkah, dan lainnya.

Tujuan

Masalah pendidikan pustakawan perlu diungkap terus menerus; dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pustakawan
2. Memberi masukan tentang standarisasi pendidikan pustakawan
3. Memberi masukan tentang perlunya evaluasi daya serap lulusan diploma dan sarjana bidang perpustakaan
4. Mendorong pustakawan untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan diri dalam

kompetisi keilmuan dengan ilmuwan bidang lain.

Pendidikan Pustakawan

Pustakawan sebagai tenaga profesional harus menguasai pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan standar yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Untuk itu muncullah berbagai pendidikan formal di beberapa perguruan tinggi. Sebab pengertian profesi merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja dari praktik, dan diuji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga, berwenang (Sulistya-Basuki, 1993: 147). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa untuk memperoleh tenaga yang profesional seharusnya melalui jalur pendidikan tinggi dan bukannya oleh sembarang lembaga. Karena perguruan tinggilah yang berhak melakukan pendidikan ini dengan segala kesiapannya seperti sarana prasarana, kualifikasi tenaga pengajar jelas terjamin, kurikulum, administrasi, laboratorium, dan lainnya.

Memang proses pendidikan di negeri kita ini rancu betul. Ada lembaga non perguruan tinggi memberikan/menjual gelar, pemal-

suan ijazah, program swadaya, kelas jarak jauh, kuliah seminggu bahkan dua minggu selama dua hari, dan seterusnya. Pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia semula berupa kursus yaitu Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (20 Oktober 1952 - 1955) yang diikuti oleh para lulusan SMU. Kursus yang berlangsung dua tahun itu untuk memenuhi kebutuhan akan ahli-ahli perpustakaan pada semua jenis perpustakaan sejak perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, sampai pada perpustakaan perguruan tinggi. Kursus tersebut pertama kali dimulai tanggal 20 Oktober 1952 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (kini Mendiknas) tanggal 8 September 1952 No.: 30418/Keb. Kemudian pada tahun 1955 kursus ini disempurnakan menjadi dua setengah tahun dengan pengakuan lulusannya sama dengan lulusan sarjana muda (golongan II b) dan nama kursus itu diubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan di bawah pengawasan Biro Perpustakaan. Kemudian pada tahun 1959 muncul pemikiran untuk meningkatkan kursus ini menjadi Akademi Perpustakaan. Setelah didiskusikan akhirnya kursus ini menjadi Sekolah Perpustakaan sebagai terjemahan *Library School*

Artikel

di luar negeri yang masa studinya menjadi tiga tahun setelah SMU. Setelah kursus dan sekolah perpustakaan itu berjalan sekitar 9 tahun, maka timbul pemikiran untuk lebih ditingkatkan lagi. Dari pemikiran ini kemudian bidang ilmu perpustakaan dijadikan satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP Universitas Indonesia Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tanggal 7 Oktober 1963 secara administratif, Jurusan Ilmu Perpustakaan dipindahkan dari FKIP IKIP (saat itu) ke Fakultas Sastra UI sampai sekarang.

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pasar, maka, jurusan perpustakaan ini semakin berkembang dan dibukalah program studi/jurusan perpustakaan & informasi oleh Perguruan Tinggi Negeri/PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta/PTS.

Pendidikan formal perpustakaan di perguruan tinggi terdapat jalur profesional dan jalur akademik. Pendidikan profesional lebih ditekankan pada kemampuan penguasaan ketrampilan atau keahlian teknis (Diploma). Kemudian jalur akademik diharapkan mampu menghasilkan tenaga ahli yang menguasai teori dan mampu mengembangkan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustaka-

wan. Adapun jalur profesional ini telah diselenggarakan oleh UGM, IAIN (dalam proses menjadi UIN) Sunan Kalijaga, UNS, UI, IPB, UNAIR, USU, UNDIP, UNILA, Univ. Bengkulu, Univ. YARSI, IAIN Imam Bonjol, IAIN Ar Raniry, UT, dan lainnya. Sedangkan jalur akademik untuk SI juga telah diselenggarakan oleh IAIN Sunan Kalijaga, UI, UNPAD, Univ. Wijayakusuma Surabaya, dan lainnya. Adapun pendidikan program S2 perpustakaan diselenggarakan oleh UI, UNPAD, dan UGM.

Maraknya pendidikan pustakawan itu didorong oleh berbagai faktor antara lain; perkembangan teknologi informasi, tuntutan masyarakat, dianggap bidang baru, dan merupakan, jalur alternatif

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan kadang sulit diikuti karena keterbatasan kita. Teknologi diartikan sebagai penerapan sistem sains secara sistematis yang merupakan himpunan rasionalitas insani kolektif untuk memanfaatkan lingkungan hidup dan mengendalikan gejala-gejala di dalam proses produktif dan ekonomis (Baiquni, 1979).

Teknologi informasi merupa-

kan perpaduan antara komputer, komunikasi, data, dan media penyimpanan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan informasi. Komputer itu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan adanya komunikasi data akan memungkinkan komputer berdiri sendiri dan dapat terintegrasi pada jaringan komputer lokal maupun internasional. Sedangkan media penyimpanan digunakan untuk mempresentasikan data dengan tujuan untuk pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi.

Perkembangan teknologi informasi ini berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan bidang informasi, dan komunikasi di perguruan tinggi. Maka, kini berkembang program studi/jurusan manajemen informasi, informatika, komputer, komunikasi, dan lainnya.

2. Tuntutan Masyarakat

Pendidikan yang dilaksanakan sekarang sebenarnya menyiapkan manusia-manusia yang akan hidup di masa mendatang. Agar hasil pendidikan sekarang ini sesuai dengan tuntutan jaman, maka perlu disiapkan produk yang sesuai terutama yang terkait dengan kebutuhan informasi. Sebab semakin tinggi peradaban dan perkembangan

intelektual manusia, maka semakin meningkat tuntutan kualitas dan kuantitas informasi yang mereka perlukan. Memang terdapat beberapa penelitian yang menggambarkan masyarakat Indonesia di masa mendatang seiring dengan perkembangan jaman. Salah satu penelitian menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mendatang antara lain digambarkan :

- a. Kehidupan di Indonesia akan semakin baik, dinamis, dan cerah. Akan tetapi kondisi semakin sulit, rumit, penuh tantangan, dan kendala dalam banyak hal.
- b. Menuntut pendidikan yang lebih relevan
- c. Pendidikan semakin berperan
- d. Menuntut kualitas manusia yang lebih baik, memiliki kebudayaan utama, sebagai sumber ketahanan nasional, memiliki budaya upajawa baik atas dasar minat, kemampuan, keahlian atau prestasi tertentu (Sumantri, 1994: 26).

3. Dianggap Bidang Baru

Pendidikan bidang perpustakaan di Indonesia secara formal memang relatif baru apabila dibandingkan dengan pendidikan bidang lain. Cikal bakal pendidikan pustakawan di Indonesia dimulai

Artikel

dari Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan pada tanggal 20 Oktober 1952 di Jakarta. Berkembangnya program diploma perpustakaan di mulai pada tahun 1980an sampai sekarang.

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi, maka bidang ini semakin menarik masyarakat. Faktor inilah kiranya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fungsi pendidikan pustakawan semakin luas. Lulusan pendidikan perpustakaan juga diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep baru yang mampu menyelenggarakan perpustakaan sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi (Purwono, 2003: 27).

4. Jalur Alternatif

Bagi kelompok masyarakat tertentu dengan berbagai pertimbangan, mereka mengambil program studi/jurusan ilmu perpustakaan sebagai pilihan alternatif. Dengan alternatif ini masyarakat berharap, banyak untuk memasuki dunia kerja dengan mudah karena bidang-bidang tertentu dianggap sudah jenuh.

Pola Pendidikan Pustakawan

Pola pendidikan tenaga perpustakaan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur pendidikan

formal dan jalur pendidikan nonformal. Pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan di sekolah maupun perguruan tinggi yang bersifat gradual, hierarkhis, dan berkelanjutan. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan sekolah seperti penataran, pelatihan, magang, dan lainnya.

Pendidikan dan pelatihan sesungguhnya tidak sama meskipun banyak kesamaannya. Kedua-duanya memang merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar mereka memiliki kecerdasan, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang lebih tinggi. Pendidikan lebih menekankan pada penguasaan teori. Sedangkan pelatihan cenderung pada penguasaan hal-hal yang bersifat praktis/terapan. Pendidikan merupakan kegiatan yang terprogram untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pendidikan tinggi dapat terdiri dari diploma sampai pascasarjana (Lasa Hs., 2004: 80).

Pola pendidikan formal ini dimaksudkan agar pustakawan memiliki pengetahuan umum yang luas, pengetahuan dasar mengenai suatu bidang ilmu yang diperoleh

melalui perguruan tinggi. Dengan pengetahuan yang dimilikinya itu diharapkan tumbuh sikap percaya diri dan mampu mandiri dalam mengelola perpustakaan, mengembangkan ilmu perpustakaan, dan meningkatkan peran pustakawan. Sikap seperti ini sangat diharapkan terutama dalam menghadapi era kompetitif ini. Dalam hal ini Bambang Pranowo (1998: 205) mengingatkan bahwa dalam menghadapi perkembangan di masa depan yang penuh kompetisi, bagi perguruan tinggi (sebagai penghasil sarjana) diperlukan dua kekuatan yakni daya sanding/komparasi dan daya saing/kompetisi. Kemampuan komparatif dan kompetitif adalah hasil dari suatu kreativitas dan bukan merupakan hegemoni kekuasaan. Kemudian untuk mencapai kemampuan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas baik fisik, intelektual, maupun moralnya.

Program Penyetaraan

Untuk memenuhi kebutuhan pustakawan, kecuali diselenggarakan pendidikan formal oleh perguruan tinggi, juga diselenggarakan program penyetaraan yang dapat diikuti oleh program diploma maupun sarjana bidang lain. Program ini dulu diselenggarakan

oleh Perpustakaan Nasional RI Jakarta dan Perpustakaan Nasional Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan) (Muhammad, 2003: 38)

Penyelenggaraan program tersebut semula dimaksudkan untuk menarik para lulusan diploma dan sarjana bidang lain untuk menjadi pustakawan. Sebab selama ini profesi pustakawan kurang diminati bila dibanding dengan bidang lain seperti komputer, ekonomi, dan lainnya. Namun demikian, program ini kiranya perlu ditinjau kembali dan dievaluasi tentang **efektivitas, penyelenggaraan program pendidikan tinggi, kualifikasi pengajar/penatar, rekrutmen calon peserta, dan bobot SKS nya.**

1. Efektivitas

Efektivitas pendidikan dan pelatihan perlu diketahui apabila pendidikan itu diarahkan untuk mencapai tujuan khusus. Oleh karena itu untuk mengetahui efektif tidaknya penyelenggaraan program tersebut ditandai ada tidaknya peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan perubahan kinerja peserta penataran.

Tercapainya efektivitas suatu pendidikan dan pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;

Artikel

kurikulum, pengajar/penatar, metode, sarana prasarana, tujuan, dan lainnya. Kemudian faktor penyerapan lulusan juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Untuk mengetahui efektif tidaknya penyelenggaraan program penyetaraan tersebut Muhammad (2003: 39) melakukan penelitian deskriptif pada Penataran Penyetaraan Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tahun 1999 dan tahun 2000. Penelitian ini mengambil populasi 53 orang peserta dan 43 orang pimpinan lembaga/instanst pengirim. Dari 53 responden (peserta) diperoleh informasi bahwa terdapat 28,3 % peserta tidak memenuhi persyaratan pendidikan dari yang seharusnya untuk mengikuti Diklat ini yakni minimal Diploma 11 nonperpustakaan. Ternyata 28,3 % tersebut berpendidikan. SLTA. Sedangkan bila ditinjau dari latar belakang status kepegawaian peserta ditemukan 33,9 % berstatus pegawai swasta. Padahal Diklat itu semula mensyaratkan peserta harus berstatus pegawai negeri sipil/PNS.

Dari sisi lain penyelenggaraan program ini perlu ditinjau kembali apabila betul-betul ingin meningkatkan kualitas pustakawan dan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan formal. Tuntutan kualitas

memang merupakan keniscayaan di era kompetitif ini.

Kiranya sulit diperoleh kualitas lulusan dengan program sekian Jam apalagi dengan kualifikasi pengajar/penatar yang tidak memenuhi syarat. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata hanya 18,1 % dari 22 penatar yang berijasah SI ilmu perpustakaan. Sedangkan yang lain berlatar belakang sarjana administrasi negara, teknik, pendidikan, komunikasi, dan diploma perpustakaan. Sangat disayangkan apabila dalam penyelenggaraan Diklat itu terdapat pengajar yang lulusan S tiga (sekolah seminggu selesai) yang kebetulan pejabat birokrat yang memaksakan diri untuk ikut mengajar.

Pendidikan Formal 11mu Perpustakaan

Penyelenggaraan pendidikan pustakawan di perguruan tinggi dimaksudkan untuk menciptakan tenaga profesional dan akademik. Peserta didik dibekali pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang memadai oleh tenaga pengajar yang menguasai bidang tertentu. Lulusan ini diharapkan betul-betul menguasai ilmu perpustakaan dan ilmu-ilmu terkait dengan masa studi tertentu, dengan bobot SKS tertentu, dan

rekrutmen calon peserta didik tertentu. Dengan demikian kualitas lulusan ini berbeda dengan program penyetaraan yang hanya beberapa jam dengan rekrutmen yang kurang memenuhi syarat tadi.

Dengan kondisi seperti itu kiranya tidak logis bahwa lulusan SLTA ditambah kursus bidang perpustakaan 4-5 bulan kalau disamakan dengan lulusan Diploma perpustakaan perguruan tinggi yang masa studinya antara 2-3 tahun dengan bobot SKS antara 90 - 110 SKS itu. Bukankah cara ini justru menurunkan kualitas pendidikan pustakawan. Apalagi apabila materi yang mereka terima tidak bisa untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dalam hal ini ditemukan informasi bahwa 49 % peserta mengaku bahwa pengetahuan mereka belum meningkat secara signifikan karena pengetahuan yang mereka peroleh sangat teoritis (Muhammad, 2003). Selanjutnya disimpulkan bahwa Diklat ini dianggap tidak efektif menurut persepsi peserta karena secara signifikan belum/tidak mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka belum mampu melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan dengan lancar dari materi pelajaran dinilai masih terlalu teoritis.

Upaya Peningkatan Kualitas

Di era yang kompetitif ini perlu disadari bahwa yang berkualitaslah yang mampu bersaing dan mencapai keunggulan. Tentunya kita tidak ingin bahwa lulusan pendidikan pustakawan (formal dan nonformal) nantinya hanya menjadi *pupuk bawang* atau malah menjadi pelengkap yang menderita lantaran kalah bersaing.

Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah berani untuk melakukan perbaikan dalam rekrutmen calon, kurikulum, sarana prasarana, kualifikasi pengajar, dan penyediaan sumber belajar.

Rekrutmen Calon Peserta Didik

Input suatu program studi sangat mempengaruhi output lulusan. Apabila input bagus, maka Insya Allah output tidak akan mengecewakan. Sebaliknya bila input jelek, maka keluarannyapun sulit diharapkan memenuhi standar kualitas.

Rekrutmen calon peserta didik selama ini kurang memperhatikan kualitas. Seleksi yang diselenggarakan kadang terkesan sekedar formalitas. Malah ada suatu perguruan tinggi yang merekrut calon yang motivasi mereka sangat rendah bahkan intelektualitasnya sangat rendah.

Artikel

2. Kurikulum

Kurikulum yang ditawarkan belum sepenuhnya mengacu pada permintaan pasar. Disamping itu materi yang disampaikan kepada peserta didik cenderung berorientasi pada pengolahan, penyajian informasi, dan teknologinya. Kiranya perlu dipertajam dengan materi-materi pengembangan diri calon pustakawan dan cara pengembangan sistem perpustakaan dan informasi seperti materi kewirausahaan, manajemen mutu, kepemimpinan, kemampuan komunikasi (lisan & tertulis) dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tuntutan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi biasanya merujuk pada pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu. Maka dalam hal ini seorang anak didik harus menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan/*skills and knowledge* dan mampu mengembangkannya. Disamping itu seseorang harus mampu mengubah unsur-unsur yang tersembunyi/*hidden* yakni konsep diri/*self concepts*, karakteristik pribadi/*personal characteristics*, dan motivasi/*motivation* (Spencer, 1993: 11)

Perlunya evaluasi kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan pustakawan dimaksudkan untuk menjawab tantangan jaman yang terus berubah. Oleh karena itu harus ada keberanian untuk membuang materi tradisional yang tidak diperlukan lagi sehubungan kemajuan software komputer dan CD akhir-akhir ini. Pendidikan pustakawan nantinya akan surut apabila pengelola tidak pernah merubah kurikulum sesuai perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan selektif itu.

Disamping itu selama ini dalam penyusunan kurikulum didasarkan pada maunya lembaga pendidikan dan bukan keinginan pasar. Kiranya belum ada pemikiran untuk minta masukan dari lembaga, perorangan, atau yayasan yang telah menggunakan lulusan perpustakaan. Evaluasi kurikulum seharusnya juga melibatkan pihak luar terutama pemakai jasa (tenaga) dan perlunya evaluasi maupun pendataan lulusan berapa persen yang terserap pasar kerja, berapa lama mereka menganggur setelah lulus sampai mendapat pekerjaan, dan unsur lainnya. Kajian dan pemantauan ini memang perlu untuk mengetahui kebutuhan riil pasar dan untuk

evaluasi penyelenggaraan pendidikan pustakawan.

3. Sarana prasarana

Pola pendirian dan pembukaan jurusan/program studi baru kadang tidak memperhatikan sarana prasarana yang tersedia. Penyelenggaraan sarana ini dapat dilakukan sambil berjalan dan yang penting ada dosen, calon mahasiswa, ruang kelas, dan alat tulis. Persoalan sarana laboratorium, kebun percobaan, perpustakaan, bengkel dan lainnya bisa *nuntut* lembaga lain. Maka jarang sekali jurusan perpustakaan kita yang memiliki perpustakaan sendiri sebagai sumber belajar maupun sebagai laboratorium jurusan tersebut. Hal ini terjadi mungkin dengan pertimbangan minimnya buku-buku tentang perpustakaan yang berbahasa Indonesia karena pustakawan malas menulis buku, sedangkan buku-buku asing ternyata mahal harganya.

4. Pengajar/penatar

Penyelenggaraan pendidikan pustakawan sering dengan modal nekat (*Bonek~bondo nekat*) meskipun belum/tidak memiliki dosen tetap di bidang **perpustakaan**. Akhirnya dosen dipinjam dari lembaga lain atau diambil dari pensiunan pustakawan

senior yang dianggap berpengalaman (meskipun tidak memiliki ijazah sarjana perpustakaan).

Kiranya kurang disadari oleh penyelenggara pendidikan pustakawan bahwa pendidikan tinggi bukan sekedar transfer pengalaman yang kadang sudah ketinggalan jaman sebagai akibat pesatnya teknologi informasi. Pendidikan tinggi merupakan pembekalan ilmu pengetahuan, teori, keahlian, dan ketrampilan yang harus dikuasai dan dikembangkan peserta didik/mahasiswa.

Kalau dosennya saja ketinggalan jaman, lalu bagaimana kualitas lulusan yang diharapkan nanti. Maka perlu diperhatikan kualifikasi, dedikasi, status, dan prestasi dosen yang mengajar di lembaga pendidikan pustakawan itu.

Penutup

Pendidikan profesi pustakawan di Indonesia relatif baru apabila dibandingkan dengan pendidikan profesi lain. Maka wajar apabila dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala itu antara lain rendahnya kinerja pustakawan, belum adanya standarisasi/-akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan pustakawan, tidak/belum

Artikel

adanya data daya serap lulusan pustakawan, dan lulusan pustakawan kurang mampu berkembang.

Maraknya pendidikan pustakawan sebagai tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam penyeleggiannya masih perlu peninjauan kembali tentang rekrutmen calon peserta didik, dosen, sarana, prasarana, kurikulum, dan biaya. Disamping itu perlu adanya standarisasi penyelenggaraan pendidikan, survei/penelitian tentang penyerapan lulusan, dan keterlibatan pemakai lulusan dalam penyusunan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, Sri Sanituri. *Pendidikan Tenaga Perpustakaan di Indonesia*. Makalah Kongres IPI III tanggal 22-24 September 1983 di Yogyakarta
- Lasa Hs. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gama Media
- 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Yogyakarta: Gadjab Mada University Press
- Muhammad. 2003. *Persepsi Peserta dan Staf Kepegawaian Terhadap Efektivitas Program Pendidikan dan Penyetaraan Pustakawan di Perpustakaan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan*. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1 (1) 2003: 36
- Pranowo, Djoko. *Pembahasan Makalah Rama Pendidikan Tenaga Perpustakaan*. Makalah Kongres IPI III tanggal 22-24 September 1983 di Yogyakarta.
- Purwono. 2003. "Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan" dalam *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Somadikarta, Lily K. *Pendidikan Ahh Perpustakaan*. Makalah Kongres IPI III tanggal 22-24 September 1993 di Yogyakarta
- Sulistya-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- * Penulis. Pustakawan UGM, Mengajar D3 di FISIPOL UGM. FTP UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan INTAN Yogyakarta